

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Penelitian mengenai Analisis Transparansi Pelaksana Konstruksi pada Penyelenggaraan Proyek Pemerintah di Jawa Barat menghasilkan simpulan sebagai berikut.

1. Faktor yang mempengaruhi transparansi penyelenggaraan konstruksi menurut pelaksana konstruksi di Jawa Barat terdiri dari 36 variabel yang dikelompokkan menjadi 7 faktor yaitu: informasi umum proyek dari kontraktor, faktor informasi identitas proyek dari owner, faktor informasi dokumen kontrak dari kontraktor, faktor informasi pengadaan dari kontraktor, faktor informasi biaya dari kontraktor, faktor informasi antara owner dengan kontraktor dan faktor informasi kewajiban owner.
2. Gambaran transparansi berdasarkan fase penyelenggaraan proyek dengan nilai rata-rata 71,80% dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan indikator transparansi CoST di Jawa Barat cukup transparan. Sedangkan gambaran tingkat transparansi berdasarkan badan usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tingkat transparansi 74,18%, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tingkat transparansi 70,80% dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) mempunyai tingkat transparansi 71,53%. Sehingga dapat disimpulkan BUMN sebagai badan usaha yang memiliki tingkat transparansi tertinggi.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan simpulan diatas dapat diberikan implikasi dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data menggunakan metode survei lapangan dengan kuisisioner kurang maksimal. Tidak semua kuisisioner bisa didampingi secara langsung saat pengisian kuisisioner. Hal ini dapat menyebabkan ada kemungkinan responden salah menafsirkan pertanyaan kuisisioner yang membingungkan karena tidak dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada peneliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan dalam evaluasi kinerja publik.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel indikator lain yang mungkin dapat berpengaruh.
4. Memperbesar cakupan responden sehingga hasil penelitian dapat lebih menggambarkan transparansi penyelenggaraan konstruksi sektor pemerintah.